DAFTAR PUSTAKA

Peraturan:

Pasal 1 ayat 1 PERMA No. 1 Tahun 2016.

Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.

Pasal 1 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Desa.

Pasal 1 ayat 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 13 Peraturan Desa Majasem Kecamatan Kemangkong Tahun 2018
tentang Lelang Tanah Desa.

Pasal 1 ayat 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa.

- Pasal 1 ayat 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 22 Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sewa Tanah Kas Desa.
- Pasal 1 ayat 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 1 ayat 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 4 Peraturan Bupati Magelang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 4 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 6 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.

- Pasal 6 ayat 4 dan 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 6 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No. 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 7 n Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 12 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 42 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 42 ayat 3 a-c Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 46 ayat 2-4 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Pasal 63 ayat 1 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 63 ayat 2 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa.
- Pasal 66 ayat 2 dan 3 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 66 ayat 5 dan 6 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda Kab. Trenggalek Nomor 6 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa.

Pasal 76 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pasal 91 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1550 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1550 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1551 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 1551 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1552 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1553 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1554 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1555 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1556 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1560 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1561 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1562 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1563 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1564 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1566 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1567 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Pasal 1569 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1571 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1575 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1579 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1581 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Pasal 1583 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Prinsip-prinsip Pengadaan Tahan
Untuk Kepentingan Umum.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Buku:

Abdussamad, Zuchri. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.

Aditya, Gede Pratama. 2023. *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Cet. 1. Sumedang: CV. Mega Press Nusantara.

Ambo, Mustang Baba. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.

Citriadin, Yudin. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Suatu Pendekatan Dasar)*. Medan: Sanabil.

Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana.

Fahmi, Fatahillah. 2016. *Fungsi Tanah Kas Desa di Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Jurnal UII.

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. 2018. *Pedoman Penyusunan Skripsi*. Tulungagung: FASIH IAIN Tulungagung.

Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

- Havy, Abdul Abdul Al. 2014. *Pengantar Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Kriyantono, Rachmat. 2016. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2022. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Lajnah.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 2013. *Pengertian Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Majid, Abdul. 2017. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Makassar: Aksara Timur.
- Malikah, Zumrotul. 2012. *Konsep Harga Lelang dalam Perspektif Islam*. Semarang: IAIN Walisongo.
- Marwadani. 2020. *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar dan Analisis Data dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish.
- Mufid, Moh. 2016. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Nyak, Mukhsin Umar. 2017. *Al-Maslahah Al-Mursalah Kajian Atas (Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Banda Aceh: Turats.
- Supraptiningsih, Umi. 2021. *Kedudukan Hukum Tanah Kas Desa Dalam Sistem Hukum Tanah Nasional*. Cet ke 1. Jakarta: Kencana.
- Supriyadi. *Hukum Agraria*. 2012. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi/Thesis:

- Amanda, Fadhila Putri. 2022. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pelelangan Sewa Tanah Eks Bengkulu Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Ash Shulhu (Studi Kasus Di Kelurahan Garum Kab. Blitar)*. Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Faridyan, Rizqi Hilmi. 2023. *Problem Hukum Pemanfaatan Tanah Kas Desa Yang Terjadi Di Kalurahan Condongcatur Kapanewon Depok Kabupaten Sleman*. Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Retno, Elmi Sari. 2022. *Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari*

Nuban Kabupaten Lampung Timur. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro.

Artikel Jurnal:

Anita, Niru Sinaga. Perspektif *Force Majeure* Dan *Rebus Sic Stantibus* Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*. Vol. 11. No. 1. 2020.

Aulia, Annisa Rahma, dkk. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi Perbandingan Efektivitas Penyelesaian Sengketa Antara Jalur Litigasi Dengan Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 2. 2025.

Azis, Pahrudin dkk. Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi dan Non Litigasi, *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1. No. 2. 2024.

Cevitra, Mendy dan Gunawan Djajaputra. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya. *Jurnal Unes Law Review*. Vol. 6. No. 1. 2023.

H., Hasanah. Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial). *Jurnal At-Taqaddum*. Vol. 8. No. 2. 2016.

H., Wiliam Sianipar. Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Rectum*. Vol. 3. No. 2. 2021.

Khalid, Afif. Analisis Itikad Baik Sebagai Asas Hukum Perjanjian. *Jurnal Legal Reasoning*. Vol. 5 No. 2. 2023.

Kusuma, Ranga Putra, dkk. Efektivitas Penyelesaian Sengketa Secara Non Litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*. Vol. 7. No. 6. 2024.

M., Zamili. Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan Al-Hal*. Vol. 7. No. 2. 2015.

- N., Nilamsari. Memahami Studi Dokumen dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Wacana*. Vol. 8. No. 2. 2014.
- Oktafian, Bagus Abrianto dan Muhammad Azharuddin Fikri. Status Hak Atas Tanah Kas Desa dan Prosedur Pendaftarannya Menurut Hukum Administrasi Pertanahan. *Jurnal Pandecta*. Vol. 16. No. 2. 2021.
- Pepah, Gloria, dkk. Tinjauan Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Menurut KUHPerduta. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 3. No. 4. 2020.
- Paulus, Surahman, dan Ansar. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi dan Non Litigasi: Analisis Perbandingan. *Jurnal Ilmu Hukum dan Aktualita*. Vol. 1. No. 3. 2024.
- Permata, Nova Sari dan Robby Darwis Nasution. Pemanfaatan Tanah Ka Desa Tatung Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo Dengan Sistem Lelang Tanah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*. Vol. 5, No. 3. 2021.
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. Penerapan Masalah Mursalah dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1. 2016.
- Rizal, Faisol. Peran Mediasi Sebagai Salah Satu Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa. *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 3. No. 1. 2021.
- S., Hadi. Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif pada Skripsi. *Jurnal Ilmu Pendidik*. Vol. 22. No. 1. 2016.
- Satrya, Ihsan Azhar. Relasi Maslahat Mursalah Dengan Maqoshid Syari;ah Dalam Penetapan Hukum Fikih. *Jurnal Tazkiya*. Vol. IX. No.1. 2020.
- Sofyan, Adi. Masalah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf dan Khalaf. *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Suryaningsih, Claudia Bogar, dkk. Tinjauan Hukum Perbandingan Perjanjian Sewa Menyewa Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Lex Adminis Tratum*. 2022.
- Syarifah, Siti, dkk. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum*. Vol. 1. 2021.

Timothy, Riedel Runtuuwu, dkk. Kajian Terhadap Tanggung Gugat Karena Wanprestasi Dan Perbuatan Melanggar Hukum Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Lex Privatum*. Vol. 10. No. 1. 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Ilyas selaku Perangkat Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Joko Prayitno selaku Perangkat Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Jegeg selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Munardi selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024

Wawancara dengan Bapak Keno selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Khoiri selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bu Lamini selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Aman selaku penyewa tanah kas Desa Wonoanti. Wonoanti, 2 Desember 2024.

Wawancara dengan Bapak Ilyas selaku Perangkat Desa Wonoanti. Wonoanti, 28 Februari 2025.